



Salam Redaksi

Assalamu'alaikum..

Edisi-42 menegaskan *rahmatan lil 'alamin* sebagai ruh dan DNA ideologis PKS: nilai Islam diterjemahkan menjadi akhlak, keadilan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan yang nyata bagi masyarakat dalam konteks Indonesia yang majemuk. Visi lintas waktunya bergerak dari Islam *rahmatan lil 'alamin* menuju kader dan partai yang kokoh, hingga terwujudnya Indonesia Madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Ukuran perjuangan bukan sekadar kekuasaan, tetapi seberapa besar kemaslahatan yang dihadirkan. Karena itu, nilai rahmat harus berubah menjadi perilaku nyata: kader berakhlak, struktur melayani, kebijakan berpihak pada rakyat, serta perjuangan yang merawat persatuan dan kebangsaan.

Selamat Membaca...



MPP PKS

eBulletin IDEOLOGI

Diterbitkan oleh Majelis
Pertimbangan Pusat
(MPP)
Partai Keadilan Sejahtera

Media sosialisasi
Konsep Dasar Partai
(KDP) baik AD/ART,
Falsafah, Platform, GBKP,
Renstra PKS, dll.

Menjabarkan secara
jelas dan padat KDP
untuk pengokohan
IDEOLOGI Partai.

Karenanya penting
dibaca dan dihayati bagi
pimpinan dan kader PKS.
Juga untuk edukasi
masyarakat luas agar
lebih mengenal
perjuangan PKS.



RAHMATAN LIL 'ALAMIN: MISI DAN VISI PKS LINTAS WAKTU

Dr. Hermanto
Ketua KSOK, MPP-PKS

Pendahuluan: Risalah Rahmat bagi Semesta

Allah SWT berfirman:

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam."
(QS. Al-Anbiyā': 107)

Ayat ini menegaskan watak dasar risalah Islam: rahmat bagi seluruh alam. Risalah yang dibawa Rasulullah SAW tidak berhenti pada kesalehan individual, tetapi hadir untuk memuliakan manusia, menegakkan keadilan, menyebarkan kasih sayang, memperbaiki kehidupan dan membangun peradaban.

Karena itu, akhlak menjadi jantung dari misi kenabian. Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau diutus untuk sempurnakan kemuliaan akhlak. Al-Qur'an pun menegaskan keteladanan beliau:

"Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu."
(QS. Al-Ahzāb: 21)

Dua prinsip besar—*rahmatan lil 'alamin* dan *akhlaqul karimah*—memberikan orientasi mendasar bagi perjuangan Islam. Islam harus menghadirkan rahmat, sedangkan para pengembannya harus mencerminkan kemuliaan akhlak.

Dalam konteks perjuangan PKS, prinsip tersebut tidak berhenti sebagai doktrin normatif. Ia harus mengalami objektifikasi: nilai-nilai Islam diterjemahkan ke dalam bahasa, institusi, kebijakan dan amal nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia yang majemuk.

Falsafah Dasar Perjuangan PKS, bahkan menegaskan objektifikasi nilai-nilai Islam sebagai paradigma implementasi nilai universal Islam yang *rahmatan lil 'alamin* dalam ruang publik Indonesia yang plural.

Rahmatan Lil 'Alamin: DNA Ideologis Perjuangan PKS

PKS adalah partai politik yang berasaskan Islam. Namun Islam yang diperjuangkan bukanlah Islam yang eksklusif, tertutup dan menjauh dari realitas kebangsaan. Islam bagi PKS adalah Islam yang *rahmatan lil 'alamin*: Islam yang nilai-nilainya hadir membawa keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan, persatuan dan kemajuan.

Falsafah Dasar Perjuangan PKS menegaskan bahwa Islam menjadi pedoman, agenda perjuangan dan moralitas PKS. Karena itu Falsafah Dasar dan Paradigma Perjuangan, Ideologi dan Platform politik PKS diturunkan dari nilai dan prinsip Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Bahkan filosofi lambang PKS dalam AD/ART 2025 menyatakan bahwa dengan berlandaskan Islam *rahmatan lil-'alamin*, Partai memperjuangkan tegaknya keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, *rahmatan lil 'alamin* bukan sekadar slogan komunikasi politik. Ia merupakan DNA ideologis yang memberi ruh kepada keseluruhan bangunan perjuangan PKS.

Dari ruh inilah kemudian lahir konsepsi-konsepsi dasar Partai: AD/ART, Falsafah Dasar dan Paradigma Perjuangan, Platform Kebijakan Pembangunan, Garis Besar Kebijakan Partai, hingga Rencana Strategis Partai. AD/ART PKS sendiri menempatkan dokumen-dokumen tersebut sebagai rangkaian konseptual bagi perumusan sasaran dan pencapaian tujuan Partai.

Dari Risalah Kenabian Menuju Objektifikasi Kebangsaan

Tentu pimpinan PKS bukanlah Nabi, dan kader PKS bukanlah manusia *maksum*. Rasulullah SAW memperoleh wahyu dan bimbingan langsung dari Allah SWT. Sedangkan kader dan pemimpin Partai adalah manusia biasa yang memiliki kelemahan dan kemungkinan melakukan kekeliruan.

Justru karena itulah menjadikan *rahmatan lil 'alamin* sebagai orientasi perjuangan mengandung amanah moral yang sangat berat.

PKS tidak sedang menyamakan dirinya dengan kenabian. PKS menjadikan misi profetik sebagai sumber nilai dan arah perjuangan. Kita berikhtiar meneladani karakter kenabian—prophetic character—dalam batas kemampuan manusia: jujur, amanah, adil, santun, berani membela kebenaran, mencintai sesama dan menghadirkan kemaslahatan.

Karenanya, perjuangan politik tidak boleh kehilangan akhlak. Falsafah Dasar Perjuangan PKS mengingatkan:



tanpa akhlak, kekuasaan dapat berubah menjadi tirani; tanpa adab, kemenangan dapat berubah menjadi bencana. PKS karena itu menempatkan *akhlakul karimah* dan *rahmatan lil 'alamin* sebagai salah satu prinsip dasar perjuangannya.

Di sinilah bertemu antara *sunnah qauliyah* dan *sunnah kauniyah*. Wahyu memberi nilai, orientasi dan tujuan; sedangkan realitas masyarakat, bangsa, negara dan perkembangan zaman menjadi medan aktualisasi nilai tersebut.

Perjuangan harus tetap berakar kepada nilai yang transenden, tetapi sekaligus memahami realitas kedisinian dan kekinian.

Visi Lintas Waktu: Dari Partai menuju Indonesia Madani

Dalam AD/ART PKS 2025 ditegaskan:

"Visi Partai adalah menjadi pelopor terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Misi kelembagaannya kemudian diterjemahkan antara lain melalui penyiapan kader pemimpin bangsa yang bersih, peduli, profesional dan negarawan; pembangunan tata kelola Partai yang baik; kepeloporan dalam pelayanan, pemberdayaan dan

pembelaan masyarakat; serta menjadikan Partai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat dalam keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila.

Pada horizon perjuangan 2025–2030, GBKP merumuskannya secara lebih operasional dalam Visi PKS 2030:

"Menjadi Partai Islam Rahmatan Lil'alamiin yang Kokoh dan Terdepan Menuju Indonesia Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat."

Kokoh berarti kokohnya ideologi, kader, struktur dan tradisi kebersamaan atau amal jama'i. Sedangkan terdepan berarti menjadi pelopor dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan masyarakat serta kontribusi bagi kemanusiaan dan peradaban.

Dengan demikian terdapat garis lurus perjuangan:

Islam Rahmatan Lil 'Alamin → Akhlakul Karimah → Kader dan Partai yang Kokoh → Pelayanan, Pemberdayaan dan Pembelaan → Indonesia Madani → Cita-Cita Nasional.



Inilah visi yang bersifat lintas waktu. Periode kepengurusan boleh berganti. Pemilu datang dan pergi. Konstelasi politik berubah. Tantangan zaman terus berkembang. Tetapi orientasi ideologis tidak boleh berubah: menghadirkan rahmat melalui perjuangan yang konstitusional bagi kemaslahatan umat, bangsa dan kemanusiaan.

Dari Dokumen Menjadi *Real Behaviour*

Tantangan terbesar ideologi bukanlah merumuskannya, melainkan menghidupkannya.

Rahmatan lil 'alamin tidak cukup tertulis dalam dokumen Partai. Ia harus terinternalisasi menjadi kesadaran, karakter dan akhirnya *real behaviour* setiap kader.

Seorang kader PKS harus menjadi rahmat bagi keluarganya. Pengurus harus menjadi rahmat bagi anggotanya. Struktur harus menjadi rahmat bagi masyarakat sekitarnya. Pejabat publik harus menghadirkan rahmat melalui kebijakan yang adil. Dan Partai secara keseluruhan harus menghadirkan kemaslahatan bagi bangsa dan negara.

Karena itulah kaderisasi merupakan proses ideologisasi yang sangat strategis. AD/ART PKS mengamanatkan kaderisasi secara berjenjang dan berkelanjutan melalui pembinaan, pelatihan dan pendidikan.

Tarbiyah tidak boleh berhenti menghasilkan pribadi yang saleh secara individual. Ia harus melahirkan kesalehan sosial, kesalehan kebangsaan dan kesalehan peradaban.

Kader yang rajin beribadah tetapi tidak peduli terhadap penderitaan rakyat belum menuntaskan misi rahmatan lil 'alamin. Demikian pula politisi yang berhasil memperoleh kekuasaan tetapi kehilangan akhlak, integritas dan orientasi pelayanan telah menjauh dari ruh perjuangan.

Karena ukuran keberhasilan dakwah bukan semata-mata berapa banyak kekuasaan yang diperoleh, tetapi seberapa besar kemaslahatan yang dihadirkan melalui kekuasaan tersebut.

Rahmat yang Menjangkau Semua

Rahmat tidak mengenal batas suku, ras, golongan, daerah maupun kelas sosial.

Islam harus menjadi kekuatan integratif bangsa. Falsafah Dasar Perjuangan PKS menegaskan penghormatan terhadap pluralitas masyarakat Indonesia, penegakan hukum, moralitas,

pembangunan kesejahteraan serta penguatan *Ukhuwwah Islamiyyah*, *Ukhuwwah Wathaniyyah* dan *Ukhuwwah Basyariyyah*. Perjuangan Islam dilakukan secara adil, bijaksana, konstitusional, proporsional dan demokratis.

Karena itu pelayanan PKS harus menjangkau semua: Muslim dan non-Muslim, berbagai suku dan daerah, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, masyarakat kota maupun desa, kelompok kuat maupun mereka yang lemah dan terpinggirkan.

Dari tingkat nasional hingga wilayah, daerah, kecamatan, desa/kelurahan, bahkan lingkungan terkecil masyarakat, misi itu diwujudkan melalui tiga jalan transformasi: pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan. Dalam perjuangan struktural, pengkhidmatan diwujudkan melalui kebijakan publik yang memihak rakyat; sedangkan dalam perjuangan kultural ia hadir melalui pelayanan dan pemberdayaan langsung di tengah masyarakat.

Inilah objektifikasi rahmatan lil 'alamin: rahmat yang dapat dilihat, dirasakan dan dinikmati masyarakat.

Penutup: Menjadi Pembawa Rahmat

Rahmatan lil 'alamin adalah amanah besar.

Ia bukan sekadar identitas yang kita deklarasikan, tetapi karakter yang harus kita buktikan. Bukan sekadar frasa dalam dokumen, tetapi ruh yang harus hidup dalam diri kader, struktur, kebijakan dan seluruh amal perjuangan.

Dari risalah Rasulullah SAW, perjuangan para sahabat, perjalanan dakwah Islam di Nusantara, perjuangan kemerdekaan Indonesia, hingga perjalanan reformasi dan pembangunan bangsa, terdapat satu mata rantai panjang: menghadirkan kebaikan, keadilan dan kemaslahatan bagi manusia.

Kini mata rantai amanah itu berada di tangan kita.

Kader PKS membawa sekaligus misi ilahiyah dan misi kemanusiaan: beribadah kepada Allah dengan berkhidmat kepada manusia; menjaga nilai Islam sekaligus merawat kebangsaan; membangun kesalehan individual sekaligus memperjuangkan keadilan sosial.

Maka setiap kader hendaknya bertanya kepada dirinya sendiri:

Sudahkah kehadiran kita menjadi rahmat bagi orang lain?

Sudahkah struktur kita menjadi rahmat bagi masyarakat?



Sudahkah kekuasaan dan kebijakan yang kita perjuangkan menjadi rahmat bagi rakyat?

Sebab pada akhirnya, *rahmatan lil 'alamin* bukan terutama tentang apa yang kita katakan tentang diri kita.

Rahmatan lil 'alamin adalah apa yang dirasakan umat, rakyat, bangsa, kemanusiaan dan alam semesta karena kehadiran kita.

Wallāhu a'lam bish-shawāb.



RAHMATAN LIL'ALAMIN

MISI DAN VISI PKS
LINTAS WAKTU

Oleh:
Dr. Hermanto
Ketua Komisi SOK,
MPP-PKS

Politik
Untuk
Kemaslahatan
Semua

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi **rahmat bagi seluruh alam.**”
(QS. Al-Anbiyā': 107)



Rahmat
untuk Semua

ISLAM HADIR
BUKAN HANYA
UNTUK SATU KELOMPOK,
TAPI UNTUK SELURUH
ALAM SEMESTA.

1 RAHMAT SEBAGAI ORIENTASI PERJUANGAN

Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, memuliakan manusia, menegakkan keadilan, menyebarkan kasih sayang, dan membangun peradaban. Bagi PKS, nilai ini diterjemahkan dalam kebijakan, institusi, dan amal nyata untuk masyarakat Indonesia yang majemuk.



KEADILAN



KEMANUSIAAN



PERSATUAN



KEMAJUAN

AKHLAK
ADALAH
JANTUNG
PERJUANGAN.

“Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.”
(QS. Al-Ahzāb: 21)

2 VISI LINTAS WAKTU: MENUJU INDONESIA MADANI

PKS berikhtiar meneladani karakter kenabian dalam batas kemampuan manusia, dengan kader yang berakhlak, kokoh, melayani, memberdayakan, dan membela rakyat. **Visi PKS 2030:**

“Menjadi Partai Islam Rahmatan Lil'alamiin yang Kokoh dan Terdepan Menuju Indonesia Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat.”



ISLAM
RAHMATAN
LIL'ALAMIN



KADER &
PARTAI YANG
KOKOH



PELAYANAN,
PEMBERDAYAAN
& PEMBELAAN



INDONESIA
MADANI

KADER
BERAKHLAK
RAKYAT
SEJAHTERA
INDONESIA
MADANI

PERIODE BOLEH BERGANTI,
TAPI ORIENTASI TETAP:
MENGHADIRKAN RAHMAT BAGI UMAT,
BANGSA DAN KEMANUSIAAN.

MELAYANI
TANPA MEMBEDA

MEMBERDAYAKAN
DENGAN SOLUSI

MEMBELA
YANG LEMAH

MERAWAT
KEBANGSAAN

BERSAMA
WUJUDKAN
INDONESIA MADANI

Dari Kita,
Untuk Indonesia
yang Lebih Baik

KARENA RAHMAT
HARUS DIRASAKAN,
BUKAN HANYA DIUCAPKAN.

Bersama
Melayani
Rakyat



Untuk Semua
Suku, Agama,
Golongan



Dari Desa
Hingga Kota



Untuk Generasi
Hari Ini dan Esok



Untuk Indonesia
dan Dunia



BERITA MPP



PKS LAMPUNG PERKUAT PERAN PEMBINAAN PEJABAT PUBLIK

Bandar Lampung - Forum Konsultasi Wilayah (FKW) MPW PKS Lampung bersama MPD PKS kabupaten/kota se-Lampung, Ahad, 20 September 2026, menempatkan penguatan pembinaan pejabat publik sebagai salah satu agenda penting dalam memperjelas dan mengoptimalkan fungsi lembaga pertimbangan.

Forum membahas perlunya pola pembinaan pejabat publik yang lebih sistematis, terukur, dan terhubung antara MPW di tingkat wilayah dengan MPD di tingkat kabupaten/kota.

Dalam AD/ART PKS 2025, salah satu tugas MPD adalah melaksanakan pembinaan terhadap anggota partai yang menjadi pejabat publik di daerahnya. MPD juga mempunyai tugas memberikan pertimbangan, konsultasi, usulan dan supervisi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program partai.

Ketua DPW PKS Lampung, Ade Utami Ibnu, menekankan bahwa pembinaan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka membangun kualitas organisasi dan kualitas pejabat publik secara bersamaan.

Menurut Ade, pejabat publik merupakan bagian dari organisasi yang berhadapan langsung dengan dinamika pemerintahan dan masyarakat.

Karena itu, pengalaman dan informasi yang diperoleh pejabat publik perlu terkoneksi dengan proses pembelajaran organisasi, sekaligus tetap mendapatkan pembinaan mengenai nilai, kebijakan, platform, dan tata aturan partai.

Pembinaan, menurutnya, tidak semestinya hanya dilakukan ketika muncul persoalan. Dibutuhkan proses yang berkelanjutan agar pejabat publik memahami mandat organisasi, mampu membaca kebutuhan masyarakat, serta memiliki ruang konsultasi ketika menghadapi persoalan dalam pelaksanaan tugas publiknya.



BERITA MPP



FKW MPW-MPD PKS LAMPUNG PERKUAT PERAN PEMBINAAN PEJABAT PUBLIK

Bandar Lampung — Forum Konsultasi Wilayah (FKW) MPW PKS Lampung bersama MPD PKS kabupaten/kota se-Lampung, Ahad, 20 September 2026, menempatkan penguatan pembinaan pejabat publik sebagai salah satu agenda penting dalam memperjelas dan mengoptimalkan fungsi lembaga pertimbangan. Forum membahas perlunya pola pembinaan pejabat publik yang lebih sistematis, terukur, dan terhubung antara MPW di tingkat wilayah dengan MPD di tingkat kabupaten/kota.

Dalam AD/ART PKS 2025, salah satu tugas MPD adalah melaksanakan pembinaan terhadap anggota partai yang menjadi pejabat publik di daerahnya. MPD juga mempunyai tugas memberikan pertimbangan, konsultasi, usulan dan supervisi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program partai.

Ketua DPW PKS Lampung, Ade Utami Ibnu, menekankan bahwa pembinaan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka membangun kualitas organisasi dan kualitas pejabat publik secara bersamaan.

Ketua MPW PKS Lampung, Ahmad Mufti Salim, dalam forum tersebut juga menegaskan pentingnya MPD memahami posisi dan fungsi kelembagaannya secara utuh. MPD berada dalam koordinasi DPW, tetapi mempunyai mandat fungsional untuk menjalankan pertimbangan, supervisi, serta pembinaan pejabat publik.

Karena itu, MPW dan MPD diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan secara administratif, tetapi mampu membangun mekanisme yang menghasilkan evaluasi dan rekomendasi yang terukur.

Forum juga membahas pentingnya rapat DPTD sebagai salah satu ruang koordinasi strategis. Melalui forum tersebut, perkembangan organisasi maupun pelaksanaan tugas pejabat publik dapat dikomunikasikan dengan tetap memperhatikan batas kewenangan masing-masing lembaga.

Sejumlah MPD kabupaten/kota turut menyampaikan pengalaman dan kondisi pembinaan pejabat publik di daerah masing-masing. Forum menilai pengalaman tersebut perlu disintesis untuk membangun pola pembinaan yang lebih terarah dan dapat diterapkan sesuai karakter setiap daerah.

Melalui FKW MPW-MPD, diharapkan terbentuk pola pembinaan yang lebih teratur: pembekalan, komunikasi, konsultasi, evaluasi, pertimbangan, hingga tindak lanjut, sehingga hubungan lembaga pertimbangan dengan pejabat publik.